

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gautama, S. (1973). *Pengertian Tentang Negara Hukum*. PT. Alumni.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Paradigma.
- Kusumaatmadja, M. (2013). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. PT. Alumni.
- Effendi, M. (1993). *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Ghalia Indonesia.
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia*. Refika Aditama.
- Mustofa, M. (2013). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Prenadamedia.
- Nawir, D. (2020). *Manajemen Lalu Lintas*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Rhiti, H. (2015). *Filsafat Hukum*. Atma Jaya Yogyakarta.
- Ismiati, S. (2024). *Perlindungan dan Implementasi HAM di Indonesia*. CV. Saghara Indonesia Grup.
- Labolo, M. (2017). *Ketentraman dan Ketertiban Umum*. Jatinangor.
- Soekanto, S. (2000). *Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas*. Graha.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta, Rajawali Press*. Rajawali Press.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sofia, A. (2017). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bursa Ilmu.

- Supriadi, A. (2014). *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. PT. Alumni.
- Sutedi, A. (2008). *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum di dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Sinar Grafika.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.
- Yadiman. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Lekkas.
- Yanto. (2020). *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pustaka Reka Cipta.
- Yuliadi, W. H. (2015). *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*. Dunia Cerdas.

Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Republik Indonesia (1945).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia (1999).
- Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Republik Indonesia (2009).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Republik Indonesia (2006).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi Di Bidang Perhubungan.

Sumber lain

Dico, M. R. B. (2023). *Keberlakuan Hukum bagi Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id>

Fattah, D. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Jurnal Tapis*, 9(2), 30–45.

Febriana, M. R. (2023). *Pendapat Hukum Tentang Upaya yang Dapat Dilakukan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Rusaknya Jalan Di Kabupaten Subang dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata*. Thesis, Universitas Pasundan.

Fiandy, R. (2021). *Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Izin Penutupan Jalan*. Skripsi, Universitas Hasanuddin.

Indrawati, S. (2017). *Pelaksanaan Penutupan Jalan Yang Bersifat Pribadi Di Kota Makassar*. Skripsi, Universitas Hasanuddin.

Kusmiati, N. I. (2016). *Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Diluar Kuhperdata, Dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum*.

Meidasari, D. (2019). *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Membangun Kesadaran Berlalu Lintas Masyarakat (Studi Kasus Di Polsek Rengasdengklok)*.

Rahmansyah, R. A. (2023). *Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Nd Sebagai Korban Tabrak Lari Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Cianjur*. Thesis, Universitas Pasundan.

Rumate, K. G., Siar, L., & Mamahit, C. E. M. (2023). Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Atas Kerusakan Jalan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Lex Vartum*. 11(2).

Siregar, M. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Korban Akibat Kerusakan Jalan Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.